



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
SUB UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LALU FIRMAN WIJAYA
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 515682

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.358.350.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 510 m2/300 m2 di KOTA MATARAM ,
WARISAN Rp. 1.000.000.000
2. Tanah Seluas 247 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp.
123.350.000
3. Tanah Seluas 140 m2 di KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp.
60.000.000
4. Tanah Seluas 500 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp.
75.000.000
5. Tanah Seluas 2.500 m2 di LOMBOK TENGAH, HIBAH DENGAN
AKTA Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 206.000.000

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
6.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 113.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 146.690.362**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.824.540.362

III. HUTANG Rp. 308.127.545



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.516.412.817

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **23 Oktober 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.